

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori keagenan (*agency theory*)

Penelitian ini menggunakan *grand theory* teori keagenan. Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. Dengan teori agensi ini dapat dipelajari pula mengenai masalah yang timbul akibat adanya hubungan keagenan. Selain itu hubungan keagenan menghasilkan suatu biaya, yang biasa disebut dengan *agency cost*.

Teori keagenan mempunyai hubungan yang erat dengan adanya *corporate governance*. Transparansi dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam penerapan *good governance* yang baik, di mana teori keagenan menyediakan *framework* yang berhubungan dengan pengungkapan *good governance* (2011 :17). *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Selain itu *good corporate governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Petrie (2010 :24) menyebutkan bahwa prinsipal harus mengeluarkan biaya (*cost*) untuk memonitor kinerja dari agen, menentukan struktur insentif dan untuk melaksanakan monitoring yang efisien. Salah satu bentuk alat monitoring yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik.

Zimmerman (2013 :22) menyatakan dalam konteks pemerintahan terdapat *agency problem* di dalamnya. Di lingkup perusahaan, *agency problem* terjadi antara pemegang saham yang berperan sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Sedangkan pada sektor pemerintahan, *agency problem* terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai *agent* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *principal*. Setyaningrum dan Safitri (2012 :10) menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam lingkup pemerintah daerah adalah adanya asimetri informasi, di mana pejabat pemerintah daerah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat sebagai prinsipal sehingga dalam pengambilan keputusan lebih banyak membuat keputusan atau kepentingan pemerintah maupun penguasa saja dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Stakeholder Theory

Dalam Penelitian ini menggunakan *Stakeholder Theory*. Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (2010 :12). Freeman (2011 :22) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.*” bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik, sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.

Tabel 2.1.
Stakeholder Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Stakeholder sektor public	Stakeholder sektor swasta
Stakeholder eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat pengguna jasa public b. Masyarakat pembayar pajak c. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan sebagai input atas aktivitas organisasi d. Bank sebagai kreditur pemerintah e. Badan-badan internasional seperti bank dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. f. Investor asing dan country anlysis Stakeholder internal <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Negara (cabinet, MPR, DPR, /DPR, dsb) b. Kelompok politik (partai politik) c. Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD) d. Pegawai pemerintah 	Stakeholder eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Bank sebagai kreditur b. Serikat buruh c. Pemasok d. Pemerintah e. Distributor f. Pelanggan g. Serikat dagang (trade union) h. Pasar modal Stakeholder internal <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen b. karyawan c. Pemegang saham

Sumber : mardiasmo (2009)

Bryson (2001) mendefinisikan *stakeholder* ialah suatu individu, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang - Undang Dasar 2006

pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Stewardship Theory

Selain teori *stakeholder*, teori lain yang mendasari penelitian ini ialah teori *stewardship*. Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 2009, 2010) dalam Raharjo (2007). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, menurut Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.1.2 Teori Kendali Organisasi

Teori ini dikemukakan oleh Tompkins dan Cheney. Tompkins dan Cheney mengatakan bahwa mereka tertarik dalam cara-cara komunikasi biasa membentuk kendali atas pegawai. Kendali dinyatakan dalam organisasi dengan empat cara. Pertama, kendali sederhana (*simple control*), atau penggunaan kekuasaan yang

langsung dan terbuka. Kedua, kendali teknis (*technical control*), atau penggunaan alat-alat dan teknologi. Bentuk kendali yang ketiga adalah birokrasi yang merupakan penggunaan prosedur organisasi dan aturan-aturan formal. Keempat adalah kendali konsertif (*concertive control*), yaitu penggunaan hubungan interpersonal dan kerjasama tim sebagai sebuah cara kendali. Dalam organisasi konsertif, aturan dan regulasi yang tertulis jelas, digantikan oleh pemahaman pemaknaan nilai, objektif, dan cara-cara pencapaian bersama sejalan dengan apresiasi yang mendalam untuk misi organisasi dalam Littlejohn (2009).

Komunikasi merupakan suatu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan organisasi. Komunikasi dalam organisasi menjadi suatu sistem aliran yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi, sehingga menghasilkan sinergi. Jika salah dalam pemberian instruksi, salah dalam penafsiran perintah atau tugas dari atasan, maka akan menjadi fatal dalam mekanisme kerja organisasi atau perusahaan Masmuh (2008)

Oleh karena itu, dalam pengelolaan komunikasi organisasi harus mengadakan evaluasi terhadap program komunikasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan komunikasi dalam sebuah organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Evaluasi komunikasi organisasi merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk menentukan atau memperlihatkan nilai suatu program komunikasi termasuk hasil atau dampak pelaksanaannya.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Laporan Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian daya keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah Suyono dalam Patriati (2010).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai Bastian dalam Patriati (2010)

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi Hamzah (2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan.

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan *efisiensi*, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan

memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Penelitian yang dilakukan Mandell (2006) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut Hamzah (2008). Efisiensi mempunyai dua makna yaitu:

1. Kinerja suatu program atau kegiatan sangat baik.
2. Dampak yang maksimum berkaitan dengan sumber daya yang dialokasikan.

Kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal Hamzah (2008). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. *Government Accounting Standard Board (GASB)*, dalam *Concept Statements No. 2*, mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori indikator dalam mengukur kinerja, yaitu (1) *service efforts*, (2) *service accomplishment*, dan (3) hubungan *efforts* dengan *accomplishment*. Penelitian Perwitasari (2010) menjelaskan bahwa *Service efforts* adalah bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam.

Lebih lanjut, *service accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu (Perwitasari, 2010). Berdasarkan GASB (2007) bahwa penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara *service efforts* dengan *service accomplishment*.

Penelitian yang dilakukan Sadjarto (2009) mendefinisikan *Efforts* atau usaha sebagai jumlah sumber daya keuangan dan *non-keuangan*, dinyatakan dalam uang

atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program atau jasa pelayanan. Pengukuran *service efforts* meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber daya keuangan dan *non-keuangan* dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan (Perwitasari, 2010).

Penelitian yang dilakukan Sadjarto (2009) mengungkapkan bahwa ukuran *accomplishment* atau prestasi yaitu *outputs* dan *outcomes*. *Outputs* mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Sedangkan, *Outcomes* mengukur hasil yang muncul dari penyediaan *output* tersebut. Pengukuran *outcomes* menjadi bermakna jika dalam penggunaannya dibandingkan dengan *outcomes* tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara *efforts* dengan *outputs* dapat memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai Sadjarto (2009). Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula *explanatory information* atau berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan, dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang terangkum dalam karakteristik pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, salah satu faktor tersebut adalah karakteristik pemerintah daerah.

Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota DPR (*users*) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya (PP RI No. 24 tahun 2005). Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara terus-menerus akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa.

Berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapannya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.

2.2.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD Patriati (2010).

Selain menggunakan parameter rasio keuangan pemerintah daerah, juga memakai analisa kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrave,

dalam hadiprojo (2008). Namun dalam penerapannya, parameter disesuaikan dengan komponen dalam APBD yaitu:

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintahan pusat dan daerah yang diukur dengan menggunakan dua rasio keuangan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah saerta lain-lain pendapatan yang sah. Total penerimaan daerah merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran adalah:

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Bagi hasil pajak merupakan pajak yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk kemudian didistribusikan antara pusat dan daerah otonomi.

2. Upaya fiskal antara lain adalah:
Total anggaran pendapatan asli daerah merupakan target besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional yang dicapai.
3. Kemandirian/kemampuan pembiayaan antara lain adalah:

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Rutin Non Belanja Pegawai}}$$

Belanja rutin non belanja pegawai merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri dari belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak terduga serta belanja lain-lain.

$$\frac{\text{Total Pajak Daerah (TPjD)}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}$$

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. Efisiensi penggunaan anggaran (kinerja pengeluaran) adalah:

$$\frac{\text{Total Sisa Anggaran Daerah (TSA)}}{\text{Total Belanja Daerah (TBD)}}$$

Sisa anggaran (sisa perhitungan anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran, yaitu:

$$\frac{\text{Total Pengeluaran Lain}}{\text{Total Belanja Daerah (TBD)}}$$

Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak tersangka yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Total belanja daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang membebani anggaran daerah.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Menurut Siporin dalam Luthfi (2013). “Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.”

Menurut Friedlander dalam Luthfi (2013) “Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat”. Jadi Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu- individu.

2.3.2 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Pada dekade 70 hingga 80-an pendekatan pembangunan di Indonesia lebih didominasi oleh upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Indikatornya adalah pencapaian pendapatan nasional bruto yaitu nilai total barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun. Namun ternyata pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama dari kalangan pemodal besar pelaku produksi barang dan jasa serta para elit yang dekat dengan akses sumber daya. Mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan tidak terjadi (Ndakularak, 2008)

Chaniago (2012) bila salah satu atau dua dari tiga kondisi yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masyarakat menjadi lebih buruk meskipun pendapatan perkapita melambung tinggi. Bank Dunia di bawah kepemimpinan Robert S Mc Namara tidak lagi hanya memberi perhatian pada mobilisasi dan penggunaan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi negara-negara berkembang, tetapi juga menekankan pada tujuan-tujuan sosial, seperti memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Artinya, pembangunan

yang dilakukan tidak saja semata-mata untuk kemajuan ekonomi namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Secara definitif, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja (Chalid, 2014). Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Suharto dalam Sari (2016: 16) kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna.

1. Kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmaterial. Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being*. Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada orang miskin.
4. Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara

lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global Taslim dalam Sari (2016).

2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Sari, (2016: 17) menyatakan indikator yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. BPS mengukur kesejahteraan rakyat melalui delapan bidang, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Teori Pertumbuhan Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan teknologi Sukirno (2010).

2.4 Pariwisata

2.4.1 Pengertian Pariwisata

Menurut Spillane dalam Siallagan (2011) pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan lain-lain. Defenisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan akan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu bersifat sementara, bersifat sukarela (Voluntary) dalam arti tidak terjadi karena paksaan, dan tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah.

Donald dalam Siallagan (2011) mengatakan pariwisata sebagai sebuah konsep dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Pariwisata adalah kegiatan di mana orang terlibat dalam perjalanan jauh dari rumah terutama untuk bisnis atau kesenangan. Pariwisata adalah bisnis menyediakan barang dan jasa untuk wisatawan dan melibatkan setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh atau untuk pengunjung untuk perjalanannya.

“Tourism as a concept can be viewed from different perspectives. It is an activity in which people are engaged in travel away from home primarily for business or pleasure. It is a business providing goods and services to travelers and involves any expenditure incurred by or for a visitor for his or her trip.”

Undang-undang Nomor 10 tahun 20012, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi: (1) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, (3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata.

2.4.2 Jenis-jenis Pariwisata

Berikut adalah jenis-jenis pariwisata, menurut Spillane dalam Sari (2011: 31) yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik customer untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut.

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, oleh mengendorkan ketegangan syaraf, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan dan sebagainya.

2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation sites*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahan.

3. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya.

4. Pariwisata untuk olahraga (*sport tourism*)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik untuk hanya menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktekkannya sendiri.

5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (*business tourism*)

Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.

6. Pariwisata untuk konvensi (*convention tourism*)

Wisatawan melakukan perjalanan wisata dengan macam-macam motivasi. Variasi motivasi ini menimbulkan bentuk-bentuk pariwisata sebagai berikut;

a. Pariwisata rekreasi atau pariwisata santai

Motif pariwisata ini adalah untuk memulihkan kemampuan fisik dan mental setiap peserta wisata dan memberikan kesempatan santai bagi mereka dari kebosanan dan keletihan kerja selama di tempat rekreasi.

b. Pariwisata budaya

Motif pariwisata ini adalah untuk memperkaya informasi pengetahuan tentang suatu daerah atau Negara lain dan untuk memuaskan kebutuhan hiburan. Dalam hal ini termasuk pula kunjungan ke pameran-pameran dan festival, perayaan-perayaan adat, tempat-tempat cagar budaya dan lain-lain.

c. Pariwisata pulih sehat

Motif pariwisata ini adalah untuk memuaskan kebutuhan perawatan medis di daerah/ tempat lain dengan fasilitas penyembuhan. Misalnya sumber air panas, tempat-tempat kubangan lumpur yang berkasiat dan lain-lain. Pariwisata ini memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu seperti kebersihan, ketenangan, dan taraf hidup yang pantas.

d. Pariwisata olah raga

Motif pariwisata ini adalah untuk memuaskan hobi orang-orang seperti memancing, berburu, bermain sky dan mendaki gunung.

e. Pariwisata temu wicara

Pariwisata ini disebut juga pariwisata konvensi yang mencakup pertemuan-pertemuan ilmiah, pertemuan bisnis, dan bahkan pertemuan politik. Pariwisata ini memerlukan fasilitas pertemuan di Negara tujuan

dan faktor-faktor lain yang penting seperti letak strategis, tersedianya transportasi yang mudah, iklim yang cerah dan sebagainya. Seorang yang berperan serta dalam konferensi itu akan meminta fasilitas wisata yang lain misalnya tour dalam dan luar kota, tempat-tempat membeli cinderamata, dan obyek-obyek wisata yang lain.

2.4.3 Penerimaan Pariwisata

Menurut Kartinah dalam Saputro (2015: 16) sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pasokan devisa negara secara nyata, langsung maupun tidak langsung dapat dinikmati oleh para pelaku sektor tersebut secara riil. Bisnis pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang perolehan devisa yang cukup besar bagi negara khususnya wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan domestik akan merupakan sumber PAD yang potensial pada era otonomi daerah yang terus dikembangkan karena peluang yang cukup besar.

Menurut Pitana dan Diarta (2012) pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan disektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penerimaan pariwisata dalam penelitian ini adalah pembayaran atas layanan yang diberikan oleh perusahaan atau tempat usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan, khususnya dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri

pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi vila/pesanggrahan, serta retribusi tempat rekreasi.

2.4.4 Wisatawan dan Hubungan Jumlah Wisatawan Dan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

2.4.4.1 Wisatawan

Menurut Spilane dalam Saputro (2015) wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pesiar yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, olahraga.
2. Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi-konferensi, misi.

Sedangkan yang dianggap wisatawan adalah :

1. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain.
2. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau karena tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintahan, diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain).
3. Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan tertentu.
4. Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun tinggal di suatu negara kurang dari 24 jam.

Menurut Pendit dalam Saputro (2015) wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukrela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Menurut Dimiyati dalam Saputro (2015) wisatawan, menurut asal negara dari mana mereka datang, dapat dibedakan menjadi wisatawan asing atau macanegara (wisman) dan wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik (wisdom). Menurut Mill dalam Saputro (2015) wisatawan asing adalah setiap orang yang mengunjungi sebuah negara, selain dari negara yang biasa ditinggali untuk kurun waktu kurang lebih 24 jam. Wisatawan

domestik adalah setiap orang yang tinggal dalam sebuah negara, tanpa menghiraukan kewarganegaraannya, yang melakukan perjalanan ke sebuah tempat dalam negara tersebut selain dari tempat tinggalnya selama kurun waktu tidak kurang dari 24 jam atau semalam untuk keperluan selain aktivitas yang mendapat bayaran di tempat yang dikunjunginya.

2.4.4.2 Hubungan Jumlah Wisatawan Dengan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

Menurut Yoeti (2008) kedatangan wisatawan mancanegara atau nusantara merupakan sumber penerimaan bagi daerah atau negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja. Menurut Cohen (2009) dalam Pitana dan Diarta (2012) suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Jika wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut sangat banyak, maka pengeluaran uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut antara lain :

1. Dampak terhadap penerimaan devisa negara.
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
3. Dampak terhadap kesempatan kerja.
4. Dampak terhadap harga-harga.
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan.
6. Dampak terhadap kepemilikan dan control.
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Menurut Wahab dalam Saputro (2015) wisatawan yang tiba disuatu negara asing, baik secara individu maupun dalam kelompok, apapun tujuan perjalanannya, akan membelanjakan uangnya selama menetap di daerah tujuan untuk membayar jasa-jasa atau barang wisata dan membeli jasa-jasa atau barang yang tidak berkaitan dengan wisata. Seluruh jumlah uang yang dibelanjakan merupakan jumlah

penerimaan negara dari sektor pariwisata dan menjadi pola konsumsi wisatawan di negara tersebut. Semakin bertambah konsumsi wisatawan, semakin banyak pula jasa-jasa wisata yang diproduksi.

Secara teoritis, semakin banyak jumlah wisatawan dan semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha di industri pariwisata dari pembayaran atas pelayanan yang diterima oleh wisatawan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan komponen dari PAD industri pariwisata. Misalnya, pajak atas pelayanan hotel, restoran, hiburan ataupun retribusi di industri pariwisata. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung, maka akan meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah.

2.4.5 PDRB dan Hubungan PDRB di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah di Industri Pariwisata

2.4.5.1 PDRB

Menurut Todaro dalam Saputro (2015), pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian) .

Menurut Nasrull (2010), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata. Semakin besar tingkat PDRB masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Lampung.

2.4.5.2 Hubungan PDRB di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah di Industri Pariwisata

Salah Satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB, PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu :

1. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
2. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Sadono Sukirno (2010).

Dalam penyajiannya, PDRB selalu dibedakan atas dua, yakni atas dasar harga konstan dan atas dan dasar harga berlaku. Adapun defenisi pembagian PDRB ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
2. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah.

Menurut Dimiyati dalam Saputro (2015), dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi Sembilan sektor, yaitu :

1. Pertanian,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Listrik, gas dan air minum,
5. Bangunan,
6. Perdagangan, hotel dan restoran,
7. Angkutan dan komunikasi,
8. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan,
9. Jasa-jasa.

Keadaan perekonomian suatu Negara dapat dilihat dari PDRB nya, dimana pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diukur dengan salah satu indikator yakni PDRB, sehingga dengan kesimpulan bahwa ketiga indikator tersebut, yakni PDRB, keadaan ekonomi suatu wilayah dan PDRB adalah saling berkaitan satu sama lain.

PDRB yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh PDRB suatu wilayah, tentunya juga berperan terhadap peningkatan daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kemudian jika dikaitkan dengan pengadaan perjalanan wisata, tentunya PDRB yang dapat diindikasikan dengan PDRB, memiliki andil yang cukup positif terhadap pengadaan perjalanan wisata itu sendiri sebab pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah orang-orang dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (*income*) yang cukup besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka telah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.

2.5 Penelitian Terdahulu

Widiastuti (2013) dengan judul penelitian; Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Biro Keuangan Setda Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan analisis jalur diketahui bahwa sektor pariwisata berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hiariey (2013) dengan judul dampak pariwisata terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di kawasan wisata pantai natsepa, pulau ambon, menyimpulkan bahwa berdasarkan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu persentase sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan persentase sebesar 22% dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase sebesar 3%.

Lutfhi (2013) melakukan penelitian dengan judul peran pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor lapangan pekerjaan dan perekonomian tahun 2009 – 2013 (studi kasus: Kota Batu). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran pariwisata memiliki peran positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Batu di sektor Lapangan Pekerjaan dan Perekonomian. Hal tersebut terlihat dari analisis pendapatan responden serta pernyataan dari responden secara langsung. Dari pernyataan yang diberikan masing-masing responden bahwa responden merasakan terjadi peningkatan pada pendapatan mereka walaupun tidak secara kontinue tiap tahun, serta responden merasakan bahwa dengan adanya pembangunan di sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian dan lapangan pekerjaan meskipun dampak negatifnya sektor pertanian agak turun, jalanan macet, dan tanah semakin tidak subur.

Utama (2006) melakukan penelitian dengan judul; pengaruh perkembangan pariwisata terhadap kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan pariwisata berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perekonomian, berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan struktur ekonomi, tetapi terhadap kesejahteraan masyarakat, perkembangan pariwisata tidak berpengaruh signifikan. Perkembangan pariwisata berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi.

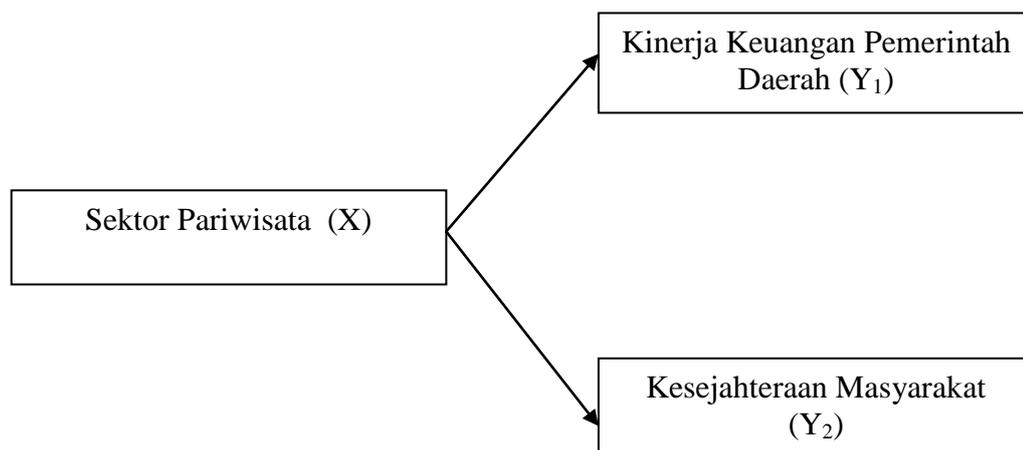
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ni Komang Widiastuti (2013)	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Sektor Pariwisata, Kinerja Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat	kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan analisis jalur diketahui bahwa sektor pariwisata berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
2.	Hiariey et.al (2013)	Dampak pariwisata terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di kawasan wisata pantai natsepa, pulau ambon	Pariwisata, pendapatan, kesejahteraan	berdasarkan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu persentase sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan persentase sebesar 22% dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase sebesar 3%

3	Renaldy Rkhman Lutfhi (2013)	Peran pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor lapangan pekerjaan dan perekonomian tahun 2009 – 2013 (studi kasus: Kota Batu)	Kinerja pegawai, budaya Organisasi, komitmen organisasi, dan akuntabilitas	Peran pariwisata memiliki peran positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Batu di sektor Lapangan Pekerjaan dan Perekonomian. Hal tersebut terlihat dari analisis pendapatan responden serta pernyataan dari responden secara langsung
4	Made Suyana Utama (2006)	Pengaruh perkembangan pariwisata terhadap kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali	Perkembangan pariwisata, kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi serta kesejahteraan masyarakat	Perkembangan pariwisata berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perekonomian, berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan struktur ekonomi, tetapi terhadap kesejahteraan masyarakat, perkembangan pariwisata tidak berpengaruh signifikan. Perkembangan pariwisata berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi.

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pasokan devisa negara secara nyata, langsung maupun tidak langsung dapat dinikmati oleh para pelaku sektor tersebut secara riil. Bisnis pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang perolehan devisa yang cukup besar bagi negara khususnya wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan domestik akan merupakan sumber PAD yang potensial pada era otonomi daerah yang terus dikembangkan karena peluang yang cukup besar. Kartinah dalam Saputro (2015: 16)

Peranan pariwisata dalam pembangunan negara secara makro meliputi tiga segi yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada para wisatawan). Ketiga segi tersebut tidak saja berlaku bagi wisatawan asing, tetapi juga untuk wisatawan-wisatawan domestik yang kian meningkat peranannya (Spillane dalam Hiariey, 2013: 1).

Hasil penelitian Widiastuti (2013) membuktikan adanya pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sektor Pariwisata berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

2.7.2 Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Pitana dan Diarta (2012) pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan disektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata, dan lain-lain.

Hiariey (2013) dengan judul dampak pariwisata terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di kawasan wisata pantai natsepa, pulau ambon, menyimpulkan bahwa berdasarkan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan.

Hasil Widiastuti (2013) membuktikan adanya pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sektor pariwisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.